

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi dan seluruh transaksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jawa Tengah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto selama satu periode pelaporan. Laporan terutama digunakan membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya peraturan perundang-undangan.

SKPD RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan SKPD RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh anggaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan perturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar serta kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca. Setiap pos aset dan kewajiban diungkapkan mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek

3. Piutang pajak dan bukan pajak
 4. Persediaan
 5. Investasi jangka panjang
 6. Aset tetap
 7. Kewajiban jangka pendek
 8. Kewajiban jangka panjang
 9. Ekuitas dana
- c. Laporan Operasional(LO)
- LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
- e. Laporan Arus Kas(LAK)
- Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
- f. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut :
1. Informasi tentang kebijakan/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
 3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, juga mengatur bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012.
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah.
- n. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/010567 Tanggal 23 Oktober 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah., maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.2. Kewajiban

5.1.3. Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

5.2.2. Belanja

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Catatan Penting Lainnya

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

A. PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III TAHUN 2014

Kinerja perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2014 bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 179.199,1 milyar meningkat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2014 yang sebesar Rp 174.239,1 milyar. Selanjutnya jika dilihat atas dasar harga konstan 2000, PDRB triwulan III tahun 2014 sebesar Rp 60.004,2 milyar meningkat dibanding triwulan II tahun 2014 yang sebesar Rp 59.082 milyar. Dengan demikian, perekonomian triwulan III tahun 2014 dibandingkan triwulan II tahun 2014 mengalami pertumbuhan 1,6 persen.

Selama triwulan III tahun 2014, sektor-sektor ekonomi yang membentuk PDRB mengalami pertumbuhan kecuali sektor pertanian. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (4,7 persen), diikuti sektor pertambangan dan penggalian (2,9 persen), dan sektor jasa-jasa (2,4 persen). Sementara sektor yang lain mengalami pertumbuhan 2,1 persen kebawah.

Sektor pertanian pada triwulan III tahun 2014 mengalami pertumbuhan negatif 1,5 persen terhadap triwulan II tahun 2014, dimana hal tersebut disebabkan pertumbuhan negatif pada subsektor kehutanan, tabama dan perikanan masing-masing sebesar minus 19,2 persen, minus 2,4 persen dan minus 1,2 persen. Sementara itu subsektor lain pada sektor pertanian mengalami kenaikan yaitu subsektor perkebunan sebesar 3,3 persen, dan subsektor peternakan dan hasilnya sebesar 2,1 persen.

Sektor industri pengolahan, pada triwulan III tahun 2014 mengalami pertumbuhan 1,9 persen terhadap triwulan II tahun 2014. Pertumbuhan tersebut disumbang oleh pertumbuhan subsektor industri non migas sebesar 2,2 persen dan subsektor industri migas sebesar minus 0,3 persen.

Tabel 1
Nilai PDRB Triwulan III 2013, Triwulan II dan III 2014 (Milyar Rupiah)

Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2000		
	Triw III 2013	Triw II 2014 *)	Triw III 2014 **)	Triw III 2013	Triw II 2014 *)	Triw III 2014 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	31 117,0	30 832,3	30 787,4	9 988,4	9 905,9	9 761,8
2. Pertambangan dan Penggalian	1 551,4	1 753,2	1 812,9	639,7	658,6	677,7
3. Industri Pengolahan	51 517,2	58 245,5	59 997,0	18 416,4	19 368,6	19 734,0
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1 689,1	1 825,8	1 878,7	498,1	524,7	528,0
5. Konstruksi	9 520,0	10 325,5	10 614,1	3 415,1	3 488,0	3 562,0
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	33 209,4	35 984,4	37 310,9	12 674,8	13 422,8	13 705,8
7. Pengangkutan dan Komunikasi	10 064,3	10 368,8	10 976,9	3 127,4	3 213,0	3 364,0
8. Keuangan, Real estat dan Jasa Persh.	5 993,4	6 631,5	6 814,9	2 320,0	2 465,5	2 492,3
9. Jasa-jasa	17 142,8	18 272,3	19 006,4	5 823,6	6 034,8	6 178,6
PDRB	161 804,6	174 239,1	179 199,1	56 903,5	59 082,0	60 004,2

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Besarnya sumbangan masing-masing sektor dalam menciptakan laju pertumbuhan selama triwulan III tahun 2014 merupakan sisi lain yang perlu dicermati. Sektor ekonomi yang nilai nominalnya besar tetap akan menjadi penyumbang bagi pertumbuhan. Andil pertumbuhan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Sektor Ekonomi (Persentase)

Sektor Ekonomi	Triw III 2014 ^(*) Terhadap Triw II 2014 ^(*) (Q to Q)		Triw III 2014 ^(*) Terhadap Triw III 2013 ^(*) (Y on Y)		Triw I-III 2014 ^(*) Terhadap Triw I-III 2013 ^(*) (C to C)	
	Laju	Sumber	Laju	Sumber	Laju	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	(1,5)	(0,2)	(2,3)	(0,4)	(0,2)	0,0
2. Pertambangan dan Penggalian	2,9	0,0	5,9	0,1	5,0	0,1
3. Industri Pengolahan	1,9	0,6	7,2	2,3	6,4	2,1
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,6	0,0	6,0	0,1	6,6	0,1
5. Konstruksi	2,1	0,1	4,3	0,3	5,6	0,3
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,1	0,5	8,1	1,8	6,9	1,5
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,7	0,3	7,6	0,4	5,9	0,3
8. Keuangan, Real estat dan Jasa Persh.	1,1	0,0	7,4	0,3	9,3	0,4
9. Jasa-jasa	2,4	0,2	6,1	0,6	5,6	0,6
Produk Domestik Regional Bruto	1,6	1,6	5,4	5,4	5,3	5,3

^(*) Angka sementara

^(**) Angka sangat sementara

Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2014 bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2013 (y-on-y) mengalami pertumbuhan 5,4 persen. Pertumbuhan tersebut didukung semua sektor ekonomi, dimana sektor perdagangan , hotel dan restoran mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,1 persen, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,6 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 7,4 persen; sektor industri pengolahan sebesar 7,2 persen; sektor jasa-jasa sebesar 6,1 persen; sektor listrik gas dan air bersih sebesar 6,0 persen; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 5,9 persen; sektor bangunan sebesar 4,3 persen dan sektor pertanian sebesar minus 2,3 persen.

Jika kita bandingkan periode Januari-September tahun 2014 terhadap periode yang sama tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai angka 5,3 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan sebesar 9,3 persen, disusul sektor perdagangan hotel dan restoran, dan sektor listrik,gas, dan air bersih masing-masing tumbuh 6,9 dan 6,6 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian sebesar minus 0,2 persen. Data rinci tentang pertumbuhan PDRB Jawa Tengah berdasarkan periode penghitungannya dapat dilihat pada tabel 2 diatas.

B. STRUKTUR PDRB JAWA TENGAH MENURUT SEKTOR EKONOMI TAHUN 2012-2013, DAN TRIWULAN III 2014

Pada triwulan III tahun 2014, sektor ekonomi yang memiliki sumbangan terbesar dalam perekonomian Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 33,5 persen, diikuti

oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,8 persen, dan sektor pertanian sebesar 17,2 persen. Secara keseluruhan ketiga sektor tersebut mempunyai sumbangan sebesar 71,5 persen dalam PDRB. Dengan demikian peranan enam sektor lainnya terhadap PDRB sebesar 28,5 persen.

Tabel 3
Struktur PDRB Jawa Tengah Menurut Sektor Ekonomi
Tahun 2012-2013 dan Triwulan III Tahun 2013-2014

Sektor Ekonomi	2012	2013 ^{*)}	Triwulan III	
			2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	18,7	18,3	19,2	17,2
2. Pertambangan dan Penggalian	0,9	1,0	1,0	1,0
3. Industri Pengolahan	32,8	32,6	31,8	33,5
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,0	1,1	1,0	1,0
5. Konstruksi	6,0	6,0	5,9	5,9
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,3	20,7	20,5	20,8
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,9	6,0	6,2	6,1
8. Keuangan, Real estat dan Jasa Persh.	3,6	3,7	3,7	3,8
9. Jasa-jasa	10,7	10,7	10,6	10,6
Produk Domestik Regional Bruto	100,0	100,0	100,0	100,0

^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

C. PDRB MENURUT PENGGUNAAN

Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, PDRB Jawa Tengah dipengaruhi oleh berbagai komponen permintaan, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non profit, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal atau investasi, dan ekspor - impor.

PDRB atas dasar harga berlaku triwulan III tahun 2014 senilai Rp 179.199,1 milyar, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumahtangga sebesar Rp 113.853,7 milyar. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran konsumsi lembaga non profit sebesar Rp 2.689,3 milyar, konsumsi pemerintah sebesar Rp 20.029,8 milyar, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar Rp 36.592,8 milyar, transaksi ekspor sebesar Rp 88.472,5 milyar dan impor Rp 83.701,0 milyar. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (triwulan II tahun 2014) PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp 174.239,1 milyar menjadi Rp 179.199,1 milyar. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan beberapa komponen, seperti terlihat pada tabel 4 di atas.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2014 tercatat sebesar 1,6 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh hampir semua komponen PDRB Penggunaan, kecuali konsumsi lembaga non profit yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 3,5 persen. Komponen PDRB Penggunaan lainnya mengalami pertumbuhan positif, yaitu konsumsi rumahtangga tumbuh sebesar 2,6 persen; konsumsi pemerintah sebesar 8,8 persen; pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,6 persen; komponen ekspor sebesar 1,6 persen dan komponen impor sebesar 4,7 persen.

Apabila dilihat dari andil atau sumber pertumbuhan masing-masing komponen, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2014 sebagian besar bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga sebesar 1,6 persen, konsumsi pemerintah sebesar 1,0 persen dan ekspor sebesar 0,9 persen.

Tabel 4
Nilai PDRB Jawa Tengah Menurut Penggunaan
Triwulan III 2013, Triwulan II dan III 2014

Komponen Penggunaan	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)			Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyar Rupiah)		
	Triw III 2013 ¹⁾	Triw II 2014 ²⁾	Triw III 2014 ³⁾	Triw III 2013 ¹⁾	Triw II 2014 ²⁾	Triw III 2014 ³⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	103 320,4	109 028,7	113 853,7	35 793,5	36 755,7	37 727,9
2. Konsumsi Lembaga Non Profit	2 347,3	2 752,5	2 689,3	759,8	859,8	829,8
3. Konsumsi Pemerintah	17 859,0	18 086,4	20 029,8	6 834,8	6 613,6	7 197,0
4. PMTB	32 209,4	35 353,2	36 592,8	11 060,0	11 316,2	11 615,7
5. Perubahan Stok ¹⁾	4 235,9	2 238,3	1 208,5	1 144,6	107,1	37,4
6. Ekspor	75 970,5	86 192,2	88 472,5	30 108,5	31 760,7	32 267,6
7. Dikurangi Impor	74 137,9	79 412,0	83 647,5	28 797,7	28 331,2	29 671,2
PDRB	161 804,6	174 239,1	179 199,1	56 903,5	59 082,0	60 004,3

¹⁾ Selisih statistik ²⁾ Angka sementara ³⁾ Angka sangat sementara

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan penyumbang terbesar diantara komponen pengeluaran lainnya, secara riil (atas dasar harga konstan 2000) meningkat sebesar 2,6 persen pada triwulan III tahun 2014 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2014. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumahtangga tersebut terutama terjadi pada komoditas bukan makanan sebagai akibat adanya perayaan hari raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru. Demikian juga pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku naik dari Rp 109.028,7 milyar pada triwulan II tahun 2014 menjadi Rp 113.858,7 milyar pada triwulan III tahun 2014 atau meningkat sebesar 4,4 persen.

Pengeluaran konsumsi lembaga non profit atas dasar harga konstan menurun sebesar 3,5 persen pada triwulan III tahun 2014 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2014, demikian juga pengeluaran konsumsi lembaga non profit atas dasar harga berlaku yang mengalami penurunan dari Rp 2.752,5 milyar pada triwulan II tahun 2014 menjadi Rp 2.689,3 milyar pada triwulan III tahun 2014 atau turun 2,3 persen. Penurunan pada konsumsi lembaga non profit sebagai akibat telah berakhirnya proses pemilihan presiden yang mempengaruhi aktivitas kegiatan organisasi masyarakat dan partai politik.

Pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan III tahun 2014 mengalami peningkatan yang terutama disebabkan oleh kenaikan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pemerintah. Besarnya pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku naik dari Rp 18.086,4 milyar pada triwulan II tahun 2014 menjadi Rp 20.029,8 milyar pada triwulan III tahun 2014 atau naik sebesar 10,7 persen, dan untuk harga konstan 2000 tumbuh sebesar 8,8 persen.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp 35.353,2 milyar pada triwulan II tahun 2014 menjadi Rp 36.592,8 milyar pada triwulan III

tahun 2014 atau naik sebesar 3,5 persen. PMTB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan III tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 2,6 persen bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2014. Peningkatan PMTB atas dasar harga konstan 2000 tersebut terjadi pada barang modal berupa bangunan maupun bukan bangunan (seperti mesin dan alat transportasi).

Nilai ekspor atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp 86.192,2 milyar pada triwulan II tahun 2014 menjadi Rp 88.472,5 milyar pada triwulan III tahun 2014, atau meningkat sebesar 2,6 persen. Begitu juga, jika dilihat atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 1,6 persen. Kenaikan ekspor terutama bersumber dari ekspor antar daerah sedangkan ekspor luar negeri mengalami kontraksi pertumbuhan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Nilai impor Jawa Tengah atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp 79.412,0 milyar pada triwulan II tahun 2014 menjadi Rp 83.701,0 milyar pada triwulan III tahun 2014, atau meningkat sebesar 5,4 persen. Begitu juga nilai impor Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2000 tumbuh sebesar 4,7 persen, dari Rp 28.331,2 milyar pada triwulan II tahun 2014 menjadi Rp 29.671,2 milyar pada triwulan III tahun 2014. Peningkatan impor didukung baik oleh impor luar negeri maupun impor antar daerah yang semuanya mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 5
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Penggunaan

Komponen Penggunaan	Triw III 2014 ^(*) Terhadap Triw II 2014 ^(*) (Q to Q)		Triw III 2014 ^(*) Terhadap Triw III 2013 ^(*) (Y on Y)		Triw I-III 2014 ^(*) Terhadap Triw I-III 2013 ^(*) (C to C)	
	Laju	Sumber	Laju	Sumber	Laju	Sumber
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,6	1,6	5,4	3,4	5,2	3,2
2. Konsumsi Lembaga Non Profit	-3,5	-0,1	9,2	0,1	11,9	0,2
3. Konsumsi Pemerintah	8,8	1,0	5,3	0,6	3,6	0,4
4. PMTB	2,6	0,5	5,0	1,0	7,0	1,3
5. Ekspor	1,6	0,9	7,2	3,8	8,2	4,3
6. <u>Dikurangi Impor</u>	4,7	2,3	3,0	1,5	4,8	2,3
PDRB	1,6	-	5,4	-	5,3	-

^(*) Angka sementara ^(**) Angka sangat sementara

Dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan yang sama tahun 2013 (*y-on-y*) secara umum pada triwulan III tahun 2014 semua komponen penggunaan menunjukkan peningkatan. Tingkat pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada komponen konsumsi lembaga non profit yang mencapai 9,2 persen, diikuti oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,2 persen, kemudian komponen konsumsi rumah tangga tumbuh 5,4 persen, komponen konsumsi pemerintah tumbuh 5,3 persen, komponen pembentukan modal tetap bruto tumbuh 5,0 persen dan komponen impor tumbuh sebesar 3,0 persen.

Jika kita membandingkan periode triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2014 dengan periode yang sama di tahun 2013 (*c-to-c*), pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada komponen

konsumsi lembaga non profit sebesar 11,9 persen; disusul oleh komponen ekspor yang tumbuh 8,2 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada komponen konsumsi pemerintah, yaitu 3,6 persen.

Tabel 6
Distribusi PDRB Jawa Tengah Menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

Komponen Penggunaan	2012	2013 ^{*)}	Triwulan II		Triwulan III	
			2013 ^{*)}	2014 ^{**)}	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	64,0	63,9	62,5	62,6	63,9	63,5
2. Konsumsi Lembaga Non Profit	1,4	1,5	1,4	1,6	1,5	1,5
3. Konsumsi Pemerintah	11,1	11,2	10,7	10,4	11,0	11,2
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,6	20,0	19,4	20,3	19,9	20,4
5. Perubahan Stok ^{*)}	1,2	1,4	3,7	1,3	2,6	0,7
6. Ekspor Neto	2,7	2,1	2,3	3,9	1,1	2,7
Produk Domestik Regional Bruto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

^{*)} Selisih statistik ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Dilihat dari pola distribusi PDRB penggunaan, tampak bahwa konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDRB Jawa Tengah dan kontribusinya mengalami peningkatan dari 62,6 persen di triwulan II tahun 2014 menjadi 63,5 persen di triwulan III tahun 2014.

Selain komponen konsumsi rumah tangga, komponen PDRB Penggunaan yang mengalami peningkatan peranan pada triwulan III tahun 2014 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2014 adalah konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto, yaitu masing-masing dari 10,4 persen menjadi 11,2 persen dan 20,3 persen menjadi 20,4 persen.

Kondisi sebaliknya terjadi pada 3 (tiga) komponen lainnya, yaitu mengalami penurunan kontribusi pada triwulan III 2014, yaitu komponen konsumsi lembaga non profit (1,6 persen menjadi 1,5 persen), perubahan stok (1,3 persen menjadi 0,7 persen) dan ekspor neto (3,9 persen menjadi 2,7 persen).

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 (triwulan III tahun 2013), meskipun peranan masing-masing komponen mengalami perubahan, namun konsumsi rumah tangga tetap merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Penggunaan. Perubahan tersebut terutama terjadi pada komponen pembentukan modal tetap bruto dan ekspor neto yang mengalami peningkatan peranan dari 19,9 persen menjadi 20,4 persen dan 1,1 persen menjadi 2,7 persen, sementara komponen perubahan stok mengalami penurunan peranan dari 2,6 persen menjadi 0,7 persen. (Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah No. 68/11/33/Th.VIII, 5 November 2014)

Dalam Struktrur Pemerintah Daerah. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.

- Tingkat daya beli masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.
- Adanya persiapan dengan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang kompetitif, baik dari tarif dan bentuk pelayanan.
- Adanya globalisasi dilingkungan jasa pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masuknya/didirikannya Rumah Sakit Berstandar Internasional (International Hospital).
- Tingkat inflasi yang belum stabil/Fluktuatif yang menyebabkan kenaikan harga-harga bahan baku rumah sakit (antara lain : obat-obatan, alat kesehatan, bahan penunjang lainnya, dll)

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Jawa Tengah mengacu pada kebijakan keuangan nasional. Fokus kebijakan keuangan ditujukan pada keunggulan daerah masing-masing. Jawa Tengah masih termasuk dalam daerah yang menarik sebagai tujuan investasi, sehingga pertumbuhan investasi Jawa Tengah cukup tinggi. Relokasi pasar tujuan ekspor mendorong perbaikan kinerja ekspor.

Dengan kebijakan yang telah diuraikan diatas, maka sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel dan restoran serta jasa usaha lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

Dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan yang baik pendapatan dan belanja di RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto tahun anggaran 2014 agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran, dan manfaat serta disiplin anggaran maka diambil langkah-langkah kebijakan keuangan berupa :

- Pengembangan jenis/produk dan cakupan pelayanan dalam rangka peningkatan potensi-potensi pendapatan rumah sakit.
- Peningkatan cost recovery dalam rangka menciptakan kemandirian secara finansial.
- Pengendalian belanja/biaya rumah sakit (*Cost Contiment Strategy*) dengan memperbaiki etos kerja karyawan rumah sakit.
- Pemberlakuan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang berbasis akrual.
- Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi dengan teknologi komputer (*Computerized*).
- Penyesuaian tarif berdasarkan peraturan daerah dengan memperhitungkan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat serta daya saing pengguna jasa pelayanan kesehatan.

2.3. Indikator Pencapaian Kinerja

Rasio Kemandirian; menunjukkan kemampuan BLUD dalam membiayai sendiri kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan BLUD terhadap sumber dana eksternal (pusat maupun provinsi). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan BLUD terhadap bantuan pihak eksternal (pusat maupun provinsi) semakin rendah, begitu juga sebaliknya

2.3.1. Rasio Efektivitas

Menggambarkan kemampuan BLUD dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil BLUD. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin efektif penerimaan pendapatan BLUD.

2.3.2. Rasio Efisiensi

menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dikurangi realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio maka kinerja BLUD semakin Efisien.

2.3.3. Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*)

mengukur seberapa besar kemampuan BLUD dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk rasio pertumbuhan pendapatan semakin besar rasio maka pertumbuhan BLUD semakin baik. Untuk rasio pertumbuhan beban/belanja semakin besar rasio pertumbuhan menjadi catatan tersendiri atas efektivitas dan efisiensi beban/belanja tersebut.

2.3.4. Rasio Likuiditas

menunjukkan kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajibannya dengan segera. Termasuk rasio likuiditas adalah Rasio Kas dan Rasio Lancar. Semakin besar rasio likuiditas, semakin baik kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajibannya.

Penjelasan :

Rumus Rasio Kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan BLUD}}{\text{Dana dari Pusat} + \text{Dana dari Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Keterangan:

- Pendapatan BLUD : Pendapatan asli BLUD dapat berupa pendapatan retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah kecuali Pinjaman.
- Dana dari Pusat : Semua Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan oleh BLUD.
- Dana dari Provinsi : Semua Dana yang bersumber dari APBD yang digunakan oleh BLUD.
- Pinjaman : Penerimaan yang menambah ekuitas BLUD dan wajib dibayarkan kembali pada periode pelaporan bersangkutan maupun periode pelaporan selanjutnya.

Rumus Rasio Efektifitas:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BLUD}}{\text{Target Penerimaan BLUD}}$$

Keterangan:

- Realisasi Penerimaan BLUD : Penerimaan Pendapatan BLUD dalam satu periode laporan keuangan.
- Target Penerimaan BLUD : Besaran target yang diperkirakan dan ditetapkan berdasarkan potensi riil BLUD.

Rumus Rasio Efisiensi:

$$RasioEfisiensi = \frac{Biaya\ yang\ dikeluarkan\ untuk\ mendapatkan\ penerimaan}{Realisasi\ penerimaan\ BLUD}$$

Keterangan:

Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan, adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan BLUD yang sah.

Rumus Rasio Pertumbuhan:

$$RasioPertumbuhan = \frac{Hasil\ periode\ tahun\ berjalan}{Hasil\ periode\ tahun\ sebelumnya} \times 100\%$$

Rumus Rasio Likuiditas

a. Rasio Kas

Kemampuan BLUD untuk membayar kewajiban Lancar dengan Kas dan setara Kas BLUD.

$$RasioKas = \frac{Kas + SetaraKas}{Kewajiban\ Lancar} \times 100\%$$

Keterangan:

Setara Kas : Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko nilai perubahan yang signifikan

b. Rasio Lancar

Kemampuan BLUD untuk membayar kewajiban lancar menggunakan Aset Lancar BLUD.

$$RasioLancar = \frac{Aset\ Lancar}{Kewajiban\ Lancar} \times 100\%$$

No	Rasio	Perhitungan	Keterangan
1	Rasio Kemandirian	$\frac{263.097.475.569}{387.063.564.014} \times 100\% = 68\%$	RSUD Prof.dr. Margono Soekarjo mempunyai kemampuan membiayai sendiri sebesar 68% sisanya dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah
2	Rasio Efektivitas	$\frac{263.097.475.569}{217.000.000.000} \times 100\% = 121\%$	RSUD Prof.dr. Margono Soekarjomampu melebihi target pendapatan sebesar 121%.
3	Rasio Efisiensi	$\frac{387.063.564.014}{263.097.475.569} = 1,47x$	Untuk mendapatkan realisasi 1 pendapatan, memerlukan biaya/ belanja sebesar 1,47.
4	Rasio Pertumbuhan	$\frac{263.097.475.569}{215.194.824.888} \times 100\% = 122\%$	Hasil pencapaian RSUD Prof.dr. Margono Soekarjo naik sebesar 22% dari pencapaian tahun sebelumnya.
5	Rasio Kas	$\frac{71.268.444.805,95}{9.279.581.305} = 7.68x$	Setiap satu kewajiban lancar, didukung oleh kemampuan Kas sebesar 7,68x
6	Rasio Lancar	$\frac{147.467.2994.521,16}{9.279.581.305} = 15,8x$	Setiap satu Kewajiban Lancar didukung oleh 15,8x Aset Lancar

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2014, realisasi pendapatan seluruhnya berjumlah Rp263.097.475.569,- atau 121% dari target Anggaran Pendapatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp217.000.000.000,- Hal ini berarti melebihi target penerimaan sebesar Rp46.097.475.569,- atau 21%.Rincian realisasi pendapatan sebagai berikut :

Tabel Realisasi Pendapatan TA 2014 dan TA 2013

(Dalam Rupiah)

Uraian	2014	2013
Pendapatan dari Pengembalian	17.739.560	428.532
Pendapatan BLUD :		
1. Pendapatan Pelayanan Kesehatan / Operasional :	255.688.760.430	211.128.648.636
A. Pembayaran Langsung Tunai	34.600.676.804	54.488.989.959
Insatalasi Gawat Darurat	3.173.504.269	4.738.416.350
Insatalasi Rawat Jalan	3.561.343.153	3.483.489.050
Insatalasi Rawat Inap	6.084.126.001	9.007.858.350
Insatalasi Meternal Pariental	2.013.098.455	1.404.002.700
Insatalasi Rawat Intensif Care Unit	613.053.453	720.000.000
Insatalasi Bedah Sentral	4.064.839.377	5.650.955.017
Insatalasi Laboratorium Klinik	2.510.531.367	4.475.077.351
Insatalasi Laboratorium Anatomi	261.061.680	214.590.980
Insatalasi Tranfusi Darah	646.935.382	1.084.266.916
Insatalasi Radiologi	2.788.074.599	3.800.055.072
Insatalasi Radioterapi	84.760.000	493.577.825
Insatalasi Rehab Medik	262.038.000	321.571.000
Insatalasi Hemodialisa	106.289.880	505.582.250
Insatalasi Farmasi	7.547.896.959	17.990.293.598
Insatalasi CPH	48.760.582	62.150.000
Insatalasi PLRS	11.202.000	85.178.000
Insatalasi Gizi	8.721.147	7.175.000
Insatalasi Kedokteran Forensik	22.300.000	33.975.000
Insatalasi Ambulance	792.140.500	410.775.500
B. Pembayaran dengan Jaminan	221.088.083.626	156.639.658.677
Pasien BPJS Non PBI	194.948.392.877	-
Pasien Non BPJS	26.139.690.749	-
Pasien Askes 2013	-	67.031.632.610
Pasien Astek 2013	-	5.061.954.080
Askom 2013	-	3.048.284.152

Pasien Jamkesmas 2013		
Quota	-	67.793.991.248
Non Quota	-	13.703.796.587
2. Pembayaran Non Instansi/Diklat	1.598.587.000	926.080.000
3. Pendapatan Lainnya	5.792.388.579	3.139.667.720
Pendapatan Lain-lain :		
Jasa Giro	2.291.158.960	2.056.234.725
Sewa Lahan	172.163.636	8.700.000
Jasa Lainnya	2.329.084.165	634.218.245
Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah		
Sewa Rumah Dinas	46.500.000	17.700.000
Sewa Gedung, Ruangan, Aula, Asrama, Hostel	522.981.818	225.150.000
Sewa Kantin	160.500.000	51.864.750
Sewa Lahan Untuk Parkir	270.000.000	145.800.000
Jumlah	263.097.475.569	215.194.824.888

2. Realisasi Belanja RSUD Prof dr Margono Soekarjo

Realisasi belanja RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran berakhir seluruhnya berjumlah Rp387.063.564.014 atau 89,97% dari target Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp430.236.677.000,- yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp74.382.916.128,- atau 90,76% dari target Anggaran Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar Rp81.952.262.000,- dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp312.680.647.886,- atau 89,78% dari target Anggaran Belanja Langsung yaitu sebesar Rp348.284.415.000,-

Tabel Realisasi Belanja TA.2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2014	2013
	Realisasi	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	263.097.475.569	215.194.824.888
Jumlah Pendapatan	263.062.955.024	215.194.824.888
BELANJA DAERAH		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	74.382.916.128	51.600.964.537
Belanja Pegawai	74.382.916.128	51.600.964.537
BELANJA LANGSUNG	312.680.647.886	258.959.653.343
Belanja Pegawai	17.749.503.506	12.507.127.680
Belanja Barang dan Jasa	200.216.968.488	182.956.239.463
Belanja Modal	94.714.175.892	63.496.286.200
Jumlah Belanja Daerah	387.063.564.014	310.560.617.880
Surplus/Defisit	(123.966.088.445)	(95.365.792.992)

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pencapaian Realisasi Kinerja keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi pencapaian sebesar 89.97%. Hal ini menunjukkan kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sudah baik semua program berjalan dengan baik.

Adapun ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Tahun Anggaran 2014 Keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah sebagai berikut :

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

Satuan Kerja Perangkat Daerah : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
 Fungsi :
 Sub Fungsi :
 Provinsi : JAWA TENGAH

KODE REKENING	URAIAN	BELANJA (Rp.)		REALISASI		KETERANGAN (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		ANGGARAN	REALISASI	Fisik (%)	KEU (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.337.745.000	18.050.988.331			
1.02.1.02.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	18.337.745.000	18.050.988.331	100%	98,44%	Efisiensi
1.02.1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.342.000.000	1.311.990.000			
1.02.1.02.02.19	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.342.000.000	1.311.990.000	100%	97,76%	Efisiensi
1.02.1.02.12	Prog. Peningk. Mutu Pelay. Kes. BLUD	249.050.449.000	219.648.482.103	100%	88,19%	Efisiensi
1.02.1.02.12.01.01	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	249.050.449.000	219.648.482.103			
1.02.1.02.22	Program Pelayanan Kesehatan	79.454.221.000	73.579.356.852	100%	92,61%	Efisiensi
1.02.1.02.22.0006	Kegiatan Pemenuhan Saranan Pelayanan Kesehatan	41.858.564.000	39.019.241.800			
1.02.1.02.22.0007	Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35.846.600.000	32.833.517.000			
1.02.1.02.22.0008	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	35.000.000	15.248.200			
1.02.1.02.20.03.22.003.7	Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan K	1.714.057.000	1.711.349.852			
1.02.1.02.29	Program Pendidikan Non Formal Dan Informal	100.000.000	89.830.600	100%	89,83%	Efisiensi
1.02.1.02.29.0001	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	100.000.000	89.830.600			

Purwokerto, 31 Desember 2014
 Kepala Pelayanan Umum Daerah
 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
 Pengesahan Anggaran


dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B
 NIP. 19620208 198901 1 001

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi di RSUD Prof dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD Nomor :445 / 43252b / XII / 2013 tentang Revisi Kebijakan Akuntansi BLUD adalah sebagai berikut :

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan keuangan. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. Jika diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

Basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akrual berarti bahwa transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya.

4.3. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- b. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
 - 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - 4) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e. Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan RSUD Prof dr. Margono Soekarjo Purwokerto, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.
- f. Entitas pelaporan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.3.1. Pendapatan

1. Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan.
2. Pendapatan diklasifikasikan antara lain Pendapatan usaha dari jasa layanan, Pendapatan Hibah, Pendapatan APBN, Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain, dan Pendapatan lainnya.
3. Akuntansi Pendapatan diakui pada saat seharusnya pendapatan diterima.
4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama.
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
6. Pengukuran Pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

7. Pengungkapan Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.3.2. Biaya

1. Pengertian

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya Aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih baik merupakan penurunan Aset (amortisasi) atau meningkatnya tanggung jawab (akrual/ pembebanan/ pengakuan biaya ybs.)

2. Klasifikasi Biaya

- a. Biaya Layanan

Seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan sarana medik, biaya barang dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan. Pengakuan Biaya Layanan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan Aset atau peningkatan kewajiban

- b. Biaya Umum dan Administrasi

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, dan biaya promosi. Pengakuan Biaya Umum dan Administrasi diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan Aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

- c. Biaya Lainnya

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan dan biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga dan biaya administrasi bank. Pengakuan Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan Aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

- d. Biaya Tak Terduga

Merupakan biaya yang tidak dapat di perkirakan/prediksi sejak awal, biaya yang tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang. Biaya ini antara lain akibat bencana alam, kebakaran, perampokan, pencurian, dan kecelakaan. Pengakuan Biaya ini diakui setelah kejadian tersebut terjadi dan sudah dihitung dan ditetapkan kerugiannya oleh yang expert (tim ahli penilai).

- e. Kapitalisasi Aset

Kapitalisasi adalah batasan dalam penentuan pengeluaran, apakah akan dicatat sebagai suatu Aset tetap atau pengeluaran untuk mendapatkan penghasilan.

- f. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset tetap sesuai dengan Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
- Pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);
 - Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang corak kesenian.
3. Pengukuran
- Biaya dan kerugian dicatat sebesar Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan; Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang; Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan dan Jumlah kerugian yang terjadi.
4. Pengungkapan
- Biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya. Rincian jenis biaya diungkapkan pada CaLK.

4.3.3. Aset

1. Pengertian Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang.

2. Klasifikasi Aset

a. Aset Lancar

1) Pengertian

Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan atau dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.

2) Klasifikasi Aset Lancar

a) Kas dan Setara kas

(1) Pengertian

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari Aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

(2) Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD.

(3) Pengukuran

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- b. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.

b) Piutang

(1) Pengertian

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional.

(2) Pengakuan

Piutang diakui pada saat hak untuk menagih sehubungan adanya jasa/tindakan pelayanan yang telah dilakukan terhadap pasien.

(3) Pengukuran

(a). Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

(b). Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Atas dasar daftar umur piutang dibuat cadangan piutang tidak tertagih dengan kebijakan sebagai berikut :

Tabel Perhitungan Umur Piutang :

No.	Status	Lama Menunggak	% Cadangan Tidak Tertagih
1.	Lancar	< 1 Tahun	0%
2.	Kurang Lancar	1 sampai dengan 2 Tahun	25%
3.	Kurang Lancar	Diatas 2 sampai 3 Tahun	50%
4.	Tidak Lancar	Diatas 3 sampai 5 Tahun	75%
5.	Macet	Diatas 5 Tahun	100%

(c). Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku (dimana piutang yang lebih dari 5 (lima) tahun diajukan ke Gubernur untuk persetujuan penghapusan piutang).

(4) Penyajian dan Pengungkapan

(a). Piutang usaha yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang usaha yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.

- (b). Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- (c). Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
 - i. rincian jenis dan jumlah piutang;
 - ii. jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - iii. jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang;
 - iv. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang;
 - v. jumlah piutang yang dijadikan agunan;
 - vi. jumlah piutang yang dijual (anjak piutang).

c) Persediaan

(1) Pengertian

Persediaan adalah Aset yang diperoleh dengan maksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*).

(2) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau dihasilkan dan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa, atau rusak.

(3) Pengukuran

Persediaan diukur berdasarkan sebesar harga perolehannya, dan untuk penyimpanannya dengan menggunakan metode MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), dan penjualannya berdasarkan harga terakhir (harga pasar). Persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD dinilai sebesar harga perolehannya.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- b. Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*).
- c. Setiap akhir bulan dilakukan pemeriksaan fisik persediaan di masing-masing unit dan dibuat laporannya.
- d. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), dengan dilampiri Berita Acara hasil stock opname per 31 Desember pada tahun berjalan.
- e. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain:
 - i. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - ii. jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca;

- iii. jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode;
- iv. kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan;
- v. nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.

d) Uang Muka

(1) Pengertian

Menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/ pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang muka pembelian barang/ jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/ rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

(2) Pengakuan

Uang muka diakui pada saat pembayaran, uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

(3) Pengukuran

Uang muka diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Uang muka disajikan pada kelompok aset lancar di neraca.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah uang muka serta batas waktu pertanggungjawaban.

e) Biaya di Bayar di Muka

(1) Pengertian

Pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka.

(2) Pengakuan

Biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran, diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima, dan berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu

(3) Pengukuran

Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang diterima.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- b. Biaya dibayar di muka disajikan secara netto.

b. Aset Tidak Lancar

1) Pengertian

Aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dan tidak memenuhi kriteria Aset lancar.

2) Klasifikasi Aset Tidak Lancar

a) Investasi Jangka Panjang

(1) Pengertian

Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non-permanen lainnya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

(2) Pengakuan

Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi BLUD untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

(3) Pengukuran

Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dalam hal ini dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual dan Investasi Non Permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset tidak lancar pada neraca.
- b) Pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan adalah untuk hal-hal sebagai berikut :
 - i. rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
 - ii. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi;

- iii. pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan;

b) Aset Tetap

Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu tahun.

(1) Pengakuan

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dengan nilai minimal Rp500.000,-
- Biaya perolehan Aset tetap dapat diukur secara andal.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Tidak Dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas atau diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

(2) Pengukuran

- Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan dan apabila penilaian Aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar oleh tim (apabila belum ada nilai dari Aset itu) pada saat perolehan.
- Kegiatan pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehan terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa).
- Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak kepemilikan aset tersebut.
- Nilai aset tetap pada neraca adalah nilai yang telah direkonsiliasi di internal SKPD antara pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasi dengan DPPAD selaku Pembantu Pengelola Barang.

(3) Metode Penyusutan

- Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.
- Umur manfaat adalah periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitasnya.
- Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan misalnya aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
- Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dikurangi Nilai Residu, Nilai Residu Rp.0,-. Berikut ini daftar jenis, masa manfaat dan nilai penyusutan Aset tetap :

Keterangan :

1. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibangun atau dibeli dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Peralatan dan mesin yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai perolehan minimal atau sama dengan Rp. 500.000 dan dalam kondisi siap digunakan, mencakup :
 - a. Peralatan dan perlengkapan kantor seperti peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubeler, dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.
 - b. Peralatan dan perlengkapan rumah tangga seperti alat angkut, alat bengkel, alat dapur, Penghias ruang rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, dan peralatan dan perlengkapan RT lainnya.
 - c. Peralatan kedokteran meliputi peralatan kedokteran dan peralatan kedokteran lainnya.
 - d. Peralatan laboratorium meliputi peralatan laboratorium Klinik dan Anatomi
3. Jalan, Jaringan dan Instalasi meliputi jaringan irigasi, Instalasi listrik, dan Instalasi telepon.
4. Aset tetap mencakup Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan Aset tetap diatas meliputi koleksi buku / perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan budaya.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca.
- b. Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap.
- c. Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
- d. Aset yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha (*leasing*) disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok tersendiri.
- e. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:
 - i. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan;
 - ii. metode penyusutan yang digunakan;
 - iii. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - iv. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
 - v. nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan:

- a) penambahan;
- b) pelepasan;
- c) revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah;
- d) penurunan nilai tercatat;
- e) penyusutan;
- f) setiap pengklasifikasian kembali.
- vi. eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk utang;
- vii. kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap;
- viii. uraian rincian dari masing-masing aset tetap;
- ix. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

c) Aset Tidak Berwujud

aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau tujuan administratif. Penggolongan aset tidak berwujud adalah :nama merek;piranti lunak komputer;lisensi dan waralaba; hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;resep, formula, model, desain dan prototipe; danaktiva tidak berwujud dalam pengembangan

- (1) Pengakuan, Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; Biaya perolehan Aset tidak berwujud dapat diukur secara andal; Diperoleh atau dikembangkan dengan maksud untuk digunakan.
- (2) Pengukuran, Dicatat sebesar biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut sampai siap pakai.

d) Aset Lainnya

Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu tahun.

- (1) Pengakuan, Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; Biaya perolehan Aset tetap dapat diukur secara andal; Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- (2) Pengukuran, Dicatat sebesar biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut sampai siap pakai.
- (3) Penyajian dan Pengungkapan, Aset lainnya disajikan setelah aset tetap. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan. Dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

4.3.4. Kewajiban

1. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
2. Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran kewajiban PPK yang telah diakui dalam periode berjalan.
3. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

4.3.5. Ekuitas Dana

1. Ekuitas merupakan Hak residual BLUD atas Aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki.
2. Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban lancar.
3. Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.
4. Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

TABEL MASA MANFAAT DAN PEMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Kode Akun				Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	2		Peralatan dan Mesin			
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	3
						≥75%	5
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2
						≥75%	4
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	8	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2
						≥75%	4
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2
						≥75%	4
1	3	2	05	Alat Angkutan Tak Bermotor	4	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	1
						≥75%	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	8	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2
						≥75%	4
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	1
						≥75%	2
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20	<25%	0
						25%≤ sd <50%	3
						50%≤ sd <75%	6
						≥75%	9
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							≥75%	5
1	3	2	10		Alat Bengkel Tak Bermesin	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	11		Alat Ukur	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	12		Alat Pengolahan	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	14		Alat Kantor	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	15		Alat Rumah Tangga	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	16		Komputer	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	1
1	3	2	17		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	18		Alat Studio	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	19		Alat Komunikasi	5	<25%	0

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	20		Peralatan Pemancar	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	2	21		Alat Kedokteran	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	22		Alat Kesehatan	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	23		Unit-Unit Laboratorium	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	24		Alat Peraga/Praktek Sekolah	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	8
1	3	2	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	8
1	3	2	27		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	3	2	28		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	<25%	0

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	3	2	29		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	2	30		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	7
1	3	2	31		Senjata Api dan Alat Keamanan	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	32		Persenjataan Non Senjata Api	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	0
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	1
1	3	2	34		Senjata Sinar	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	0
							50%≤ sd <75%	0
							≥75%	2
1	3	3			Gedung dan Bangunan			
1	3	3	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
					Semi Permanen	25	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	7
					Darurat	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	3	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen	50	<25%	0

Kode Akun				Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
						25%≤ sd <50%	5
						50%≤ sd <75%	10
						≥75%	15
				Semi Permanen	25	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	3
						≥75%	7
				Darurat	10	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2
						≥75%	5
1	3	3	03	Menara dan Monumen			
				Permanen	50	<25%	0
						25%≤ sd <50%	5
						50%≤ sd <75%	10
						≥75%	15
				Semi Permanen	25	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	3
						≥75%	7
				Darurat	10	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2
						≥75%	5
1	3	3	4	Rambu-Rambu	20	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	3
						≥75%	4
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
1	3	4	01	Jalan	10	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2
						≥75%	5
1	3	4	02	Jembatan	50	<25%	0
						25%≤ sd <50%	5
						50%≤ sd <75%	10
						≥75%	15
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50	<25%	0
						25%≤ sd <50%	5
						50%≤ sd <75%	10
						≥75%	15

Kode Akun				Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50	<25%	0
						25%≤ sd <50%	5
						50%≤ sd <75%	10
						≥75%	15
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	3
						≥75%	5
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2
						≥75%	3
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2
						≥75%	3
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	<25%	0
						25%≤ sd <50%	5
						50%≤ sd <75%	10
						≥75%	15
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40	<25%	0
						25%≤ sd <50%	5
						50%≤ sd <75%	10
						≥75%	15
1	3	4	11	Instalasi Air Minum Bersih	30	<25%	0
						25%≤ sd <50%	2
						50%≤ sd <75%	7
						≥75%	10
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30	<25%	0
						25%≤ sd <50%	2
						50%≤ sd <75%	7
						≥75%	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	10	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	3
						≥75%	5
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	<25%	0

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	4	18		Instalasi Gas	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	19		Instalasi Pengaman	20	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	3
1	3	4	20		Jaringan Air Minum	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10
1	3	4	21		Jaringan Listrik	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	22		Jaringan Telepon	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	10
1	3	4	23		Jaringan Gas	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ganjar Pranowo
GANJAR PRANOWO

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan uraian sebagai berikut :

5.1.1. Aset Rp 496.078.517.094,82

Total Aset sebesar Rp496.078.517.094,82,- di RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014 tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Aset	(Dalam rupiah)	
	2014	2013
1. Aset Lancar	147.467.299.521,16	93.172.459.562,75
2. Aset Tetap	337.352.304.146,12	423.389.398.384,27
3. Aset Lainnya	11.258.913.427,54	14.906.814.953,00
	496.078.517.094,82	531.468.672.900,02

5.1.1.1. Aset Lancar Rp 147.467.299.521,16

Saldo sebesar Rp147.467.299.521,16,- merupakan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2014 yang terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan rincian saldo sebagai berikut :

Aset Lancar	(Dalam rupiah)	
	2014	2013
1. Kas	71.268.444.805,95	32.608.374.854,00
2. Piutang	48.001.708.047,16	47.361.263.580,75
3. Belanja Dibayar Dimuka	234.280.545,67	-
4. Persediaan	27.962.866.122,38	13.202.821.128,00
	147.467.299.521,16	93.172.459.562,75

Saldo Aset Lancar sebesar Rp147.467.299.521,16,- bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp93.172.459.562,75,- ada peningkatan saldo sebesar Rp54.294.839.958,41,- hal ini dikarenakan ada peningkatan kegiatan belanja barang dan jasa di RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

5.1.1.1.1. Kas Rp 71.268.444.805,95

Saldo sebesar Rp71.268.444.805,95,- merupakan saldo Kas per 31 Desember 2014 yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan Bendahara Penerimaan BLUD pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dengan rincian saldo sebagai berikut :

	(Dalam rupiah)	
	2014	2013
1. Kas Di Bendahara Penerimaan BLUD	786.742.767,95	557.926.722,00
2. Kas Di Bendahara BLUD	70.481.702.038,00	32.050.448.132,00
Jumlah	71.268.444.805,95	32.608.374.854

5.1.1.1.1. Kas Bendahara Penerimaan BLUD

Rp 786.742.767,95

Saldo sebesar Rp786.742.768,95,- merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang dikelola oleh bendahara Penerimaan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo dan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dengan rincian sebagai berikut :

		(Dalam rupiah)	
		2014	2013
1. Rekening Bendahara Penerimaan Uang Muka			
No. 2-003-15068-0	761.656.960,00		557.926.722,00
2. Di Rekening Bank Jateng No: 3.00.22300.7	21.914.673,00		-
2. Di Rekening Bank Mandiri No: 1390015292281	3.171.134,95		
Jumlah	786.742.767,95		557.926.722,00

5.1.1.1.2. Kas Bendahara BLUD

Rp 70.481.702.038,00

Saldo sebesar Rp70.481.702.038,00,- merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran BLUD yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran BLUD tidak termasuk dana yang berasal dari APBD. Dan bagian dari SILPA yang akan digunakan untuk membayar kewajiban Tahun 2014 dan operasional RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2015 dan tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

		(Dalam rupiah)	
Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD		2014	2013
1. Di Rekening Bank Jateng No: 1.003.00163.2	70.276.290.558,00		31.828.305.240,00
2. Tunai Di Bendahara Pengeluaran	156.225,00		3.143.845,00
3. Tunai Di Bendahara Penerimaan	205.255.255,00		218.999.047,00
Jumlah	70.481.702.038,00		32.050.448.132,00

5.1.1.1.2. Piutang

Rp 48.001.708.047,16

Saldo sebesar Rp48.001.708.046,16,- ini merupakan piutang yang terdiri dari piutang retribusi dan cadangan piutang tak tertagih sampai dengan 31 Desember 2014. Rincian saldo piutang adalah sebagai berikut :

		(Dalam rupiah)	
		2014	2013
1. Piutang Retribusi :			
a. Piutang Umum	4.775.231.277,07		4.648.296.280,00
b. Piutang dengan Jaminan :	45.352.197.994,09		44.507.419.309,50
2. Cadangan Piutang Tak Tertagih	(2.125.721.224,00)		(1.794.452.008,75)
	48.001.708.047,16		47.361.263.580,75

5.1.1.1.2.1. Piutang Retribusi

Rp 50.127.429.271,16

Saldo sebesar Rp50.127.429.271,16,- ini merupakan piutang retribusi atau pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto tetapi sampai dengan 31 Desember 2014 belum dibayar oleh pasien, baik pasien umum maupun pasien dengan jaminan. Rincian saldo piutang adalah sebagai berikut :

		(Dalam rupiah)	
		2014	2013
1. Piutang Umum	4.775.231.277,07		4.648.296.280,00
2. Piutang dengan Jaminan :			
- Askes	610.564.934,00		4.891.836.007,00
- Inhealth	61.393.213,00		155.678.584,00
- Jamsostek	132.720.612,00		132.720.612,00

- Jamkesmas	16.203.138.932,59	28.998.314.740,00
		(Dalam rupiah)
	2014	2013
- Jamkesmas Non Kuota	10.177.092.400,50	10.328.869.366,50
- BPJS	18.167.287.902,00	
- LPSK	(0,00)	
	50.127.429.271,16	49.155.715.589,50

5.1.1.1.2.1.1. Piutang Pasien Umum Rp 4.775.231.277,07

Saldo sebesar Rp4.775.231.277,07 merupakan piutang pasien umum yang belum tertagih per 31 Desember 2014.

		(Dalam rupiah)
Piutang Pelayanan Kesehatan	2014	2013
Piutang Umum	4.775.231.277,07	4.648.296.280,00
Jumlah	4.775.231.277,07	4.648.296.280,00

5.1.1.1.2.1.2. Piutang Pasien dengan Jaminan Rp 45.352.197.994,09

Saldo sebesar Rp45.352.197.994,09,- merupakan piutang pelayanan pasien dengan jaminan yang belum dibayarkan oleh penjamin per 31 Desember 2014, terdiri dari :

		(Dalam rupiah)
Piutang dengan Jaminan	2014	2013
- Askes Sosial	610.564.934,00	4.891.836.007,00
- Inhealth	61.393.213,00	155.678.584,00
- Jamsostek	132.720.612,00	132.720.612,00
- Jamkesmas	16.203.138.932,59	28.998.314.740,00
- Jamkesmas Non Kuota	10.177.092.400,50	10.328.869.366,50
- BPJS	18.167.287.902,00	-
- LPSK	(0,00)	-
	45.352.197.994,09	44.507.419.309,50

5.1.1.1.2.2. Cadangan Piutang Tidak Tertagih Rp 2.125.721.224,00

Saldo sebesar Rp.2.125.721.224,- merupakan saldo Cadangan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2014. Kebijakan pencadangan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

No.	Status	Lama Menunggak	% Cadangan Tak Tertagih
1.	Lancar	< 1 Tahun	0%
2.	Kurang Lancar	1 sampai dengan 2 Tahun	25%
3.	Kurang Lancar	Diatas 2 sampai 3 Tahun	50%
4.	Tidak Lancar	Diatas 3 sampai 5 Tahun	75%
5.	Macet	Diatas 5 Tahun	100%

a. Cadangan Piutang Tak Tertagih Pasien Umum adalah sebagai berikut :

			(Dalam rupiah)
	2014	2014	2013
Piutang Pelayanan Kesehatan	Piutang	Cadangan	
Piutang Umum			
- Lancar	805.936.218,07	-	
- Menunggak 1-2 tahun	1.233.273.600,00	308.318.400,00	256.606.540,00
- Menunggak 2-3 tahun	1.352.365.340,00	676.182.670,00	542.460.192,50
- Menunggak 3-5 tahun	969.743.860,00	727.307.895,00	715.556.891,25
- Menunggak lebih dari 5 tahun	413.912.259,00	413.912.259,00	279.828.385,00
Jumlah	4.775.231.277,07	2.125.721.224,00	1.794.452.008,75

b. Cadangan Piutang Tak Tertagih Pasien dengan jaminan adalah sebagai berikut :

Piutang Pelayanan Kesehatan	(Dalam rupiah)	
	2014	2013
Piutang Umum		
- Lancar	45.352.197.994	44.507.419.310
- Menunggak 1-2 tahun	-	-
- Menunggak 2-3 tahun	-	-
- Menunggak 3-5 tahun	-	-
- Menunggak lebih dari 5 tahun	-	-
Jumlah	45.352.197.994	44.507.419.310

5.1.1.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Rp 234.280.545,67

Saldo sebesar Rp234.280.545,67,- merupakan beban dibayar dimuka berupa beban asuransi. Rincian saldo piutang adalah sebagai berikut :

	(Dalam rupiah)	
	2014	2013
1. Belanja Dibayar Dimuka	234.280.546	-
	234.280.545,67	-

5.1.1.1.4. Persediaan

Rp 27.962.866.122,38

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2014, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Saldo sebesar Rp27.962.866.122,38,- merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Persediaan Habis Pakai	4.903.970.769,88	3.380.170.603,00
2. Persediaan Obat-obatan	23.058.895.352,50	9.822.650.525,00
Jumlah	27.962.866.122,38	13.202.821.128,00

5.1.1.1.4.1 Persediaan Bahan Habis Pakai

Rp 4.903.970.769,88

Saldo sebesar Rp4.903.970.769,88,- merupakan saldo Persediaan Habis Pakai pada RSUD Prof.dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan Habis Pakai	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Persediaan Alat Tulis Kantor	732.810.256,00	860.374.417,00
2. Persediaan Bahan Cetak dan Pakai Habis	295.062.150,00	201.988.510,00
3. Persediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	247.732.735,00	161.880.248,00
4. Persediaan Linen / Perlengkapan Ruang Pasien	545.210.313,00	621.377.289,00
5. Persediaan Souvenir	24.554.500,00	38.271.850,00
6. Persediaan Alat Listrik & Bengkel	368.307.508,00	448.701.214,00
7. Persediaan Rumah Tangga (Kendaraan)	36.153.000,00	59.229.000,00
8. Persediaan Plumbing	65.644.625,00	74.742.800,00
9. Persediaan Makan dan Minum Pasien (Gizi)	53.365.900,00	86.010.281,00
10. Persediaan Radiologi	120.329.611,00	47.365.940,00
11. Persediaan Lab.	-	-
A. Lab. Patologi Klinik	1.620.596.993,00	289.901.904,00
B. Lab. Patologi Anatomi	119.560.382,00	162.071.666,00
12. Instalasi Transfusi Darah	306.077.575,00	52.801.442,00

13. Instalasi Radioterapi	42.285.290,00	26.792.098,00
14. Instalasi Rehab Medik	63.986.000,00	81.940.064,00
15. Instalasi Penyehatan Lingkungan	81.023.627,88	19.933.332,00
16. Instalasi Pemeliharaan Sarana	92.575.539,00	102.355.673,00
17. Instalasi Kendaraan	757.000,00	492.875,00
18. Instalasi CSSD	28.696.330,00	43.940.000,00
19. Instalasi Gizi	59.241.435,00	-
Jumlah	4.903.970.769,88	3.380.170.603,00

5.1.1.1.4.2 Persediaan Obat-obatan Rp 23.058.895.352,50

Saldo sebesar Rp23.058.895.352,50,- merupakan saldo Persediaan Obat-obatan pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014, dengan rincian saldo sebagai berikut :

Persediaan Obat-obatan	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
Gudang RSMS	18.110.945.330,45	5.052.857.127,00
Apotek Rawat Inap RSMS	320.361.701,58	983.039.530,00
Apotek Rawat Jalan ASKES RSMS	418.633.438,50	319.045.955,00
Apotek Rawat Jalan Umum RSMS	177.963.102,26	174.532.816,00
Apotek IBS RSMS	712.573.877,98	433.000.537,00
Apotek IGD RSMS	524.986.544,50	668.869.861,00
Apotek KEMO RSMS	1.392.137.303,00	-
Sub Gudang Farmasi ABIYASA	448.142.777,26	672.644.490,00
Apotik Rawat Inap ABIYASA	124.703.812,70	243.161.709,00
Apotik Rawat Jalan ABIYASA	201.652.129,98	544.258.587,00
Apotik IGD ABIYASA	136.975.576,81	260.156.509,00
Apotik IBS ABIYASA	94.078.381,22	110.757.976,00
Instalasi Rawat Inap I	32.241.286,00	47.255.738,00
Instalasi Rawat Inap II	21.663.501,00	10.220.966,00
Instalasi Rawat Inap III	10.305.207,00	15.484.517,00
Instalasi Rawat Jalan I	23.511.648,00	37.844.958,00
Instalasi Rawat Jalan II	44.091.098,00	73.697.258,00
Instalasi Maternal Perinatal	79.494.359,00	33.379.265,00
Instalasi Bedah Sentral	112.614.035,56	96.664.774,00
Instalasi Dialisis	7.167.884,00	4.016.156,00
Instalasi ICU	6.520.570,00	5.120.580,00
Instalasi Gawat Darurat I	15.560.138,00	33.224.576,00
Instalasi Gawat Darurat II	2.685.364,00	3.416.640,00
Instalasi HCU	8.772.315,00	-
Obat Kadaluwarsa/ ED	31.113.970,70	-
Jumlah	23.058.895.352,50	9.822.650.525,00

Persediaan Kadaluwarsa :

Selama tahun 2014 terdapat persediaan obat dan Alkes yang kadaluwarsa sebesar Rp31.113.970,70,- dan siap untuk dimusnahkan. Persediaan yang akan dimusnahkan ini dicatat terpisah dari pencatatan persediaan dalam gudang farmasi. Penempatan persediaan inipun dilakukan di tempat khusus yang terpisah. Persediaan kadaluwarsa ini dicatat oleh bagian akuntansi sebagai biaya pemakaian bahan, padahal persetujuan pemusnahannya sedang dalam proses dan pencatatan Obat dan Alkes ini dicatat terpisah.

Rincian Terlampir.

TOTAL OBAT & ALKES KADALUWARSA TAHUN 2014		
No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Obat	23.326.578,50
2	Alat Kesehatan	7.787.392,20
JUMLAH TOTAL OBAT & ALKES ED 2014		31.113.970,70

5.1.1.2. Aset Tetap

Rp 337.352.304.146,12

Rekening ini menggambarkan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Aset Tetap	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Tanah	105.738.750.000,00	105.738.750.000,00
2. Peralatan dan Mesin	265.643.770.117,00	206.737.419.185,00
3. Gedung dan Bangunan	151.940.352.100,00	127.642.288.760,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.020.476.109,00	10.169.909.969,00
5. Aset Tetap Lainnya	274.402.926,00	255.581.684,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.755.746.680,00	-
7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(208.021.193.785,88)	(27.154.551.213,73)
Jumlah	337.352.304.146,12	423.389.398.384,27

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp337.352.304.146,12, apabila dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp423.389.398.384,27,- terdapat penurunan sebesar Rp(86.037.094.238,15), dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)	
Penambahan	
Belanja Modal	94.714.175.892,00
Belanja Barang/Jasa	18.821.242,00
Hibah	102.000.000,00
Mutasi masuk	-
Reklasifikasi masuk	15.491.365.420,00
Koreksi	-
Penilaian	-
Jumlah Penambahan	110.326.362.554,00
Berkurang	
Penghapusan	-
Ekstrakomtabel	5.448.800,00
Reklasifikasi Keluar	15.491.365.420,00
Hibah	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah Berkurang	15.496.814.220,00
Jumlah	94.829.548.334,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2014	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	208.021.193.786

Mutasi aset tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Belanja Modal merupakan nilai realisasi belanja modal APBD Tahun Anggaran 2014
- Belanja Barang dan Jasa merupakan nilai realisasi belanja barang dan jasa APBD Tahun Anggaran 2014 yang masuk dalam kategori aset tetap.
- Hibah merupakan nilai perolehan aset dari pemerintah maupun lembaga swasta.
- Mutasi merupakan nilai penyerahan aset dari SKPD lain.
- Reklasifikasi merupakan nilai perpindahan aset yang satu ke aset yang lain dalam satu SKPD akibat adanya perbedaan rekening pada KIB tahun-tahun sebelumnya.
- Koreksi merupakan nilai koreksi atas aset yang belum tercatat dalam KIB, salah catat maupun double catat.
- Penilaian merupakan nilai aset yang semula bernilai Rp0.00 dan Rp1.00

- Penghapusan merupakan nilai harga perolehan dari aset tetap yang dijual, hilang dan rusak yang sudah diterbitkan SK penghapusan.
- Ekstrakomtabel merupakan nilai barang yang tidak masuk kategori aset tetap sesuai dengan Pergub Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan penyusutan aset tetap/penurunan nilai manfaat dari suatu aset, yang mulai diterapkan pada Tahun 2014.

Metode yang dipakai dalam melakukan penilaian aset yang tahun2014 belum bernilai maupun bernilai Rp1.00 adalah sebagai berikut :

- Aset tanah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak.
- Aset selain tanah menggunakan harga barang jenis dan tahun perolehannya sama.
- Alat angkut selain menggunakan harga barang jenis dan tahun perolehannya sama juga menggunakan Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor.

5.1.1.2.1. Tanah **Rp 105.738.750.000**

Saldo sebesar Rp105.738.750.000,- merupakan saldo Tanah pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014.

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
Uraian		2014	2013
1. Tanah		105.738.750.000	105.738.750.000
Jumlah		105.738.750.000	105.738.750.000

Saldo Tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp 105.738.750.000,- apabila dibandingkan Tahun 2013 jumlahnya tetap, tidak ada peningkatan.

5.1.1.2.2. Peralatan dan Mesin **Rp 265.643.770.117,00**

Saldo sebesar Rp265.643.770.117,- merupakan saldo Peralatan dan Mesin pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut :

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
Uraian		2014	2013
1. Alat Berat		15.714.669.482,00	12.558.843.474,00
2. Alat-alat Angkutan		3.975.953.961,00	2.561.963.961,00
3. Alat-alat Bengkel		2.250.666.000,00	2.250.666.000,00
4. Alat-alat Pertanian		26.410.500,00	26.410.500,00
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga		32.971.494.751,00	25.528.319.679,00
6. Alat Studio dan Komunikasi		648.602.249,00	648.602.249,00
7. Alat Kedokteran		207.758.914.308,00	160.865.554.456,00
8. Alat Laboratorium		2.297.058.866,00	2.297.058.866,00
Jumlah		265.643.770.117,00	206.737.419.185,00

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 sebesar Rp265.643.770.117,- apabila dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp206.737.419.185,- terdapat peningkatan sebesar Rp58.906.350.932,-

5.1.1.2.2.1. Alat-alat Berat **Rp 15.714.669.482,00**

Saldo sebesar Rp15.714.669.482,- merupakan saldo Alat-alat Berat pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2013. Dengan rincian sebagai berikut :

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
Peralatan dan Mesin		2014	2013
1. Alat-alat Berat		15.714.669.482,00	12.558.843.474,00
Jumlah		15.714.669.482,00	12.558.843.474,00

Saldo Alat-alat Berat per 31 Desember 2014 sebesar Rp15.714.669.483,- apabila dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp12.558.843.475,- terdapat peningkatan sebesar Rp3.155.826.008,- yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2014. Dengan rincian sebagai berikut :

<i>(Dalam Rupiah)</i>	
Penambahan	
Belanja Modal	3.155.826.008,00
Jumlah	<u>3.155.826.008,00</u>

5.1.1.2.2.2. Alat-alat Angkutan **Rp 3.975.953.961,00**

Saldo sebesar Rp3.975.953.961,- merupakan saldo Alat-alat Angkutan pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut :

<i>(Dalam Rupiah)</i>	
Peralatan dan Mesin	
	<u>2014</u> <u>2013</u>
1. Alat-alat Angkutan	3.975.953.961 2.561.963.961
Jumlah	<u>3.975.953.961</u> <u>2.561.963.961</u>

Saldo Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.975.953.961,- apabila dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp2.561.963.961,- terdapat penambahan aset sebesar Rp1.413.990.000,- perubahan ini karena adanya penambahan belanja modal dan hibah, dengan rincian sebagai berikut :

<i>(Dalam Rupiah)</i>	
Penambahan	
Belanja Modal	1.311.990.000
Hibah	102.000.000
Jumlah	<u>1.413.990.000</u>

5.1.1.2.2.3. Alat-alat Bengkel **Rp 2.250.666.000,00**

Saldo sebesar Rp2.250.666.000,- merupakan saldo Alat-alat Bengkel pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut :

<i>(Dalam Rupiah)</i>	
Peralatan dan Mesin	
	<u>2014</u> <u>2013</u>
1. Alat-alat Angkutan	2.250.666.000,00 2.250.666.000,00
Jumlah	<u>2.250.666.000,00</u> <u>2.250.666.000,00</u>

Saldo Alat-alat Bengkel per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.250.666.000,- apabila dibandingkan Tahun 2013 jumlahnya tetap, tidak ada peningkatan.

5.1.1.2.2.4. Alat-alat Pertanian **Rp 26.410.500,00**

Saldo sebesar Rp26.410.500,- merupakan saldo Alat-alat Pertanian pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut :

<i>(Dalam Rupiah)</i>	
Peralatan dan Mesin	
	<u>2014</u> <u>2013</u>
1. Alat-alat Pertanian	26.410.500,00 26.410.500,00
Jumlah	<u>26.410.500,00</u> <u>26.410.500,00</u>

Saldo Alat-alat Pertanian per 31 Desember 2014 sebesar Rp.26.410.500,- apabila dibandingkan Tahun 2013 jumlahnya tetap, tidak ada peningkatan.

5.1.1.2.2.5. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga **Rp 32.971.494.751,00**

Saldo sebesar Rp32.971.494.751,- merupakan saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	32.971.494.751,00	25.528.319.679,00
Jumlah	32.971.494.751,00	25.528.319.679,00

Saldo Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2014 sebesar Rp32.971.494.751,- apabila dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp25.528.319.679,- terdapat peningkatan sebesar Rp7.443.175.072,- Penambahan berasal dari belanja modal dan reklas sedangkan pengurangan karena masuk ke dalam barang ekstrakomtabel, Dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)	
Penambahan	
Belanja Modal	5.045.886.352
Reklasifikasi	3.602.902.600
	8.648.788.952
Berkurang	
Ekstrakomtabel	5.448.800
Reklasifikasi Keluar	1.200.165.080
	1.205.613.880
Jumlah	7.443.175.072

5.1.1.2.2.6. Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi Rp 648.602.249,00

Saldo sebesar Rp.648.602.249,- merupakan saldo Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	648.602.249	648.602.249
Jumlah	648.602.249	648.602.249

Saldo Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp.648.602.249,- apabila dibandingkan Tahun 2013 jumlahnya tetap.

5.1.1.2.2.7. Alat-alat Kedokteran Rp 207.758.914.308,00

Saldo sebesar Rp207.758.914.308,- merupakan saldo Alat-alat Kedokteran pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Alat-alat Kedokteran	207.758.914.308,00	160.865.554.456,00
Jumlah	207.758.914.308,00	160.865.554.456,00

Saldo Alat-alat Kedokteran per 31 Desember 2014 sebesar Rp207.758.914.307,- apabila dibandingkan Tahun 2013 sebesarRp160.865.554.455,- Jumlahnya ada peningkatan sebesar Rp46.893.359.853,-. Penambahan berasal dari belanja modal tahun 2014 dan reklasifikasi masuk dari Gedung dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)	
Penambahan	
Belanja Modal	46.611.209.852
Reklasifikasi Masuk	282.150.000
Hibah	-
Jumlah	46.893.359.852

Saldo Jaringan per 31 Desember 2014 sebesar Rp324.773.374,- apabila dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp94.274.974,- Jumlahnya ada peningkatan sebesar Rp230.498.400,- dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)
Penambahan	
Reklasifikasi Masuk	230.498.400
Jumlah	230.498.400

5.1.1.2.5. Aset Tetap Lainnya Rp 274.402.926

Saldo sebesar Rp274.402.926,- merupakan saldo Aset Tetap Lainnya pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)	
Aset Tetap Lainnya	2014	2013
1. Buku dan Kepustakaan	259.402.926	240.581.684
2. Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000	15.000.000
Jumlah	274.402.926	255.581.684

5.1.1.2.5.1. Buku dan Kepustakaan Rp 259.402.926

Saldo sebesar Rp259.402.926,- merupakan saldo Buku dan Kepustakaan pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)	
Peralatan dan Mesin	2014	2013
1. Buku dan Kepustakaan	259.402.926	240.581.684
Jumlah	259.402.926	240.581.684

Saldo Buku dan Kepustakaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp259.402.926,- apabila dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp240.581.684,- terdapat peningkatan sebesar Rp18.821.242,- yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2014.

5.1.1.2.5.2. Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Rp 15.000.000

Saldo sebesar Rp15.000.000,- merupakan saldo Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)	
Peralatan dan Mesin	2014	2013
1. Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000	15.000.000
Jumlah	15.000.000	15.000.000

5.1.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 5.755.746.680

Saldo sebesar Rp5.755.746.680,- merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)	
Peralatan dan Mesin	2014	2013
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.755.746.680	-
Jumlah	5.755.746.680	-

Berupa Pembangunan Gedung Tempat Parkir Sepeda Motor, No Kontrak : 050/14298/DPA-BLUD/2014 Tanggal 06 Mei 2014 Nilai Kontrak sebesar Rp9.374.725.000 Masa Pelaksanaan 210 Hari Kalender. Pembangunan Fisik 72% per 31 Desember 2014 dengan realisasi Rp5.755.746.680.

5.1.1.2.7. Akumulasi Penyusutan Rp (208.021.193.785,88)

Saldo sebesar Rp (208.021.193.785,88),- merupakan akumulasi penyusutan aset tetap RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014, dengan rincian akumulasi sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan :	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Alat Berat	6.121.692.332,26	-
2. Alat-alat Angkutan	2.060.532.748,63	1.665.288.253,50
3. Alat-alat Bengkel	1.913.888.000,20	-
4. Alat-alat Pertanian	26.410.500,00	-
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.872.425.491,80	-
6. Alat Studio dan Komunikasi	577.472.449,00	-
7. Alat Kedokteran	143.202.049.607,00	-
8. Alat Laboratorium	2.172.942.928,50	-
9. Akumulasi Gedung	28.442.188.856,36	25.404.950.960,23
10. Akumulasi Monumen	92.476.000,00	84.312.000,00
11. Bangunan Air / Irigasi	175.000.000,00	-
12. Instalasi	1.349.133.260,53	-
13. Jaringan	14.981.611,60	-
Jumlah	(208.021.193.785,88)	(27.154.551.213,73)

5.1.1.3. Aset Lainnya Rp 11.258.913.427,54

Saldo sebesar Rp11.258.913.427,54,- merupakan saldo Aset Lainnya berupa barang rusak pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014. Dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lainnya	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
Aset Lainnya 2013	14.906.814.953,00	14.906.814.953,00
Penghapusan Aset Lainnya TA. 2014	(3.647.901.525,46)	-
Jumlah	11.258.913.427,54	14.906.814.953,00

5.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek Rp 9.279.581.305,00

Saldo sebesar Rp9.279.581.305,- merupakan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Kewajiban	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Pendapatan Dibayar Dimuka	135.000.000,00	7.481.863.264,00
2. Utang Jangka Pendek Lainnya	9.144.581.305,00	-
Jumlah	9.279.581.305,00	7.481.863.264,00

5.1.2.1.1. Pendapatan Dibayar Dimuka Rp 135.000.000,00

Saldo sebesar Rp135.000.000,- merupakan pendapatan dibayar dimuka pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014, dengan rincian saldo sebagai berikut :

Utang Pihak Ketiga	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Pendapatan Dibayar Dimuka	135.000.000,00	0,00
Jumlah	135.000.000,00	0,00

5.1.2.1.2. Utang Jangka Pendek Lainnya**Rp 9.144.581.305,00**

Saldo sebesar Rp9.144.581.305,- merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto per 31 Desember 2014, dengan rincian saldo sebagai berikut :

Utang Pihak Ketiga	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Utang Jasa Pelayanan	8.280.000.000,00	6.764.343.459,00
2. Utang Lain-lain	864.581.305,00	717.519.805,00
Jumlah	9.144.581.305,00	7.481.863.264,00

1. Utang Jasa Pelayanan

Saldo Utang Jasa Pelayanan sebesar Rp8.280.000.000,- merupakan kewajiban pembayaran jasa pelayanan pegawai atas pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2014 dan belum dapat direalisasikan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2014.

2. Utang Lain-lain

Untuk utang lain-lain merupakan hutang RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto kepada pihak ketiga yang belum bisa dibayarkan pada Tahun Anggaran 2014.

5.1.3. Ekuitas Dana**Rp 486.798.935.789,82**

Total Kewajiban RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Dana	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Ekuitas Dana Lancar	(24.308.904.680,51)	465.744.190,00
2. Ekuitas Dana Investasi	348.611.217.573,67	398.868.405.407,00
3. Ekuitas Dana Cadangan	-	-
4. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan	162.496.622.896,67	75.949.918.115,00
	486.798.935.789,824	475.284.067.712,00

5.1.3.1. Ekuitas Dana Lancar**Rp (24.308.904.681)**

Rekening ini menggambarkan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dengan rincian saldo sebagai berikut :

Utang Pihak Ketiga	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. SILPA	(91.915.640.313,00)	(68.653.965.698,00)
SILPA	(162.397.342.351,00)	(100.704.413.830,00)
SILPA BLUD	70.481.702.038,00	32.050.448.132,00
2. Cadangan Piutang	48.001.708.047,16	47.361.263.580,75
3. Cadangan Persediaan	27.962.866.122,38	13.202.821.128,00
4. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	(9.144.581.305,00)	(7.481.863.264,00)
5. Pendapatan yang ditangguhkan	786.742.767,95	557.926.722,00
Jumlah	(24.308.904.680,51)	(15.013.817.531,25)

SILPA sebesar Rp(91.915.640.313,-) terdiri dari SILPA yang berasal dari dana APBD sebesar Rp(162.397.342.351,-) dan SILPA BLUD sebesar Rp70.481.702.038,-.

5.1.3.2. Ekuitas Dana Investasi**348.611.217.573,67**

Rekening ini menggambarkan saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014, dengan rincian saldo sebagai berikut :

Ekuitas Dana Investasi	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	337.352.304.146,12	423.389.398.384,27
2. Diinvestasikan dalam Aset lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	11.258.913.427,54	14.906.814.953,00
Jumlah	348.611.217.573,67	438.296.213.337,27

5.1.3.3. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan

Rp 162.496.622.896,67

Rekening ini menggambarkan saldo Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2014, dengan rincian saldo sebagai berikut :

Ekuitas Dana Investasi	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	234.280.545,67	
2. Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka	(135.000.000,00)	
3. RK PPKD	162.397.342.351,00	100.704.413.830,00
Jumlah	162.496.622.896,67	100.704.413.830,00

5.2. Penjelasan Pos –Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto secara garis besar jumlah realisasi adalah sebagai berikut :

URAIAN	(Dalam Rupiah)	
	2014 Realisasi	2013 Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	263.097.475.569	215.194.824.888
Jumlah Pendapatan	263.097.475.569	215.194.824.888
BELANJA DAERAH		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	74.382.916.128	51.600.964.537
Belanja Pegawai	74.382.916.128	51.600.964.537
BELANJA LANGSUNG	312.680.647.886	258.959.653.343
Belanja Pegawai	17.749.503.506	12.507.127.680
Belanja Barang dan Jasa	200.216.968.488	182.956.239.463
Belanja Modal	94.714.175.892	63.496.286.200
Jumlah Belanja Daerah	387.063.564.014	310.560.617.880
Surplus/Defisit	(123.966.088.445)	(95.365.792.992)

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi APBD RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2014 dan perbandingannya dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

5.2.1. Penjelasan Pos - Pos Pendapatan

Rp 263.097.475.569

Rekening ini menggambarkan realisasi penerimaan BLUD untuk periode Tahun Anggaran 2013. Saldo sebesar Rp263.097.475.569,- merupakan realisasi pendapatan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2014	2013
Pendapatan dari Pengembalian	17.739.560	428.532
Pendapatan BLUD :		
1. Pendapatan Pelayanan Kesehatan / Operasional :	255.688.760.430	211.128.648.636
A. Pembayaran Langsung Tunai	34.600.676.804	54.488.989.959
Insatalasi Gawat Darurat	3.173.504.269	4.738.416.350
Insatalasi Rawat Jalan	3.561.343.153	3.483.489.050
Insatalasi Rawat Inap	6.084.126.001	9.007.858.350
Insatalasi Meternal Pariental	2.013.098.455	1.404.002.700
Insatalasi Rawat Intensif Care Unit	613.053.453	720.000.000
Insatalasi Bedah Sentral	4.064.839.377	5.650.955.017
Insatalasi Laboratorium Klinik	2.510.531.367	4.475.077.351
Insatalasi Laboratorium Anatomi	261.061.680	214.590.980
Insatalasi Tranfusi Darah	646.935.382	1.084.266.916
Insatalasi Radiologi	2.788.074.599	3.800.055.072

(Dalam Rupiah)

Uraian	2014	2013
Insatalasi Radioterapi	84.760.000	493.577.825
Insatalasi Rehab Medik	262.038.000	321.571.000
Insatalasi Hemodialisa	106.289.880	505.582.250
Insatalasi Farmasi	7.547.896.959	17.990.293.598
Insatalasi CPH	48.760.582	62.150.000
Insatalasi PLRS	11.202.000	85.178.000
Insatalasi Gizi	8.721.147	7.175.000
Insatalasi Kedokteran Forensik	22.300.000	33.975.000
Insatalasi Ambulance	792.140.500	410.775.500
B. Pembayaran dengan Jaminan	221.088.083.627	156.639.658.677
Pasien BPJS Non PBI	194.948.392.877	-
Pasien Non BPJS	26.139.690.750	-
Pasien Askes 2013	-	67.031.632.610
Pasien Astek 2013	-	5.061.954.080
Askom 2013	-	3.048.284.152
Pasien Jamkesmas 2013	-	-
Quota	-	67.793.991.248
Non Quota	-	13.703.796.587
2. Pembayaran Non Instansi/Diklat	1.598.587.000	926.080.000
3. Pendapatan Lainnya	5.792.388.579	3.139.667.720
Pendapatan Lain-lain :		
Jasa Giro	2.256.638.415	2.056.234.725
Sewa Lahan	172.163.636	8.700.000
Jasa Lainnya	2.363.604.710	634.218.245
Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah		
Sewa Rumah Dinas	46.500.000	17.700.000
Sewa Gedung, Ruangan, Aula, Asrama, Hostel	522.981.818	225.150.000
Sewa Kantin	160.500.000	51.864.750
Sewa Lahan Untuk Parkir	270.000.000	145.800.000
Jumlah	263.097.475.569	215.194.824.888

Saldo Pendapatan per 31 Desember 2014 sebesar Rp263.097.475.569- apabila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp215.194.824.888,- ada peningkatan sebesar Rp 47.902.650.681,-.

5.2.2. Penjelasan Pos – Pos Belanja

Rp 387.063.564.014,00

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014. Akun ini menggambarkan Belanja Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2014. Saldo sebesar Rp387.063.564.014,- merupakan realisasi belanja per 31 Desember 2014 di RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2014	2013
1. Belanja Operasi	292.349.388.122	247.064.331.680
2. Belanja Modal	94.714.175.892	63.496.286.200
Jumlah Belanja Daerah	387.063.564.014	310.560.617.880

5.2.2.1. Belanja Operasi**Rp 292.349.388.122,00**

Saldo sebesar Rp293.349.388.122,- merupakan Belanja Operasi RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto meliputi belanja pegawai dan belanja barang, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Belanja Pegawai	92.132.419.634	64.108.092.217
2. Belanja Barang dan Jasa	200.216.968.488	182.956.239.463
Jumlah Belanja Daerah	292.349.388.122	247.064.331.680

5.2.2.1.1. Belanja Pegawai**Rp 92.132.419.634,00**

Saldo sebesar Rp92.132.419.634,- merupakan Belanja Operasi RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto meliputi belanja pegawai dan belanja barang, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Belanja Tidak Langsung	74.382.916.128	51.600.964.537
2. Belanja Langsung		
- Honorarium Non PNS	444.750.000	382.200.000
- Belanja Pegawai BLUD	17.304.753.506	12.124.927.680
Jumlah Belanja Daerah	92.132.419.634	64.108.092.217

5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa**Rp 200.216.968.488,00**

Saldo sebesar Rp200.216.968.488,- merupakan Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2014, dengan rincian saldo sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Belanja Barang Material	13.641.288.331	3.643.527.546
2. Belanja Barang dan Jasa BLUD	182.505.651.357	177.777.748.638
3. Belanja Jasa Kantor	4.070.028.800	1.534.963.279
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	200.216.968.488	182.956.239.463

5.2.2.2. Belanja Modal**Rp 94.714.175.892,00**

Saldo sebesar Rp94.714.175.892,- merupakan Belanja Modal per 31 Desember 2014, Rincian belanja modal berdasarkan kelompok jenis belanja adalah sebagai berikut :

Belanja Modal	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Tanah	-	-
2. Peralatan dan Mesin	56.124.912.212,00	35.258.405.200,00
3. Gedung dan Bangunan	32.833.517.000,00	28.237.881.000,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5. Aset Tetap Lainnya	-	-
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	5.755.746.680,00	-
Jumlah Belanja Daerah	94.714.175.892,00	63.496.286.200,00

Saldo belanja modal sebesar Rp94.714.175.892,- jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp63.496.286.200,- ada peningkatan sebesar Rp31.217.889.692,-. Rincian belanja berdasarkan sumber modal baik APBD maupun BLUD adalah sebagai berikut :

Belanja Modal	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
1. Belanja Modal APBD	74.876.098.652,00	43.543.187.000,00
2. Belanja Modal BLUD	19.838.077.240,00	19.953.099.200,00
Jumlah Belanja Daerah	94.714.175.892,00	63.496.286.200,00

Rincian saldo belanja modal nya adalah sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)	
BELANJA MODAL APBD		2014	2013
1. BM Pengadaan Alat-alat Berat	-	-	-
2. BM Pengadaan Alat-alat Angkutan	1.311.990.000	-	-
3. BM Pengadaan Peralatan Kantor	742.550.000	291.625.000	-
4. BM Pengadaan Perlengkapan Kantor	818.050.000	176.450.000	-
		(Dalam Rupiah)	
BELANJA MODAL APBD		2014	2013
5. BM Pengadaan Komputer	555.350.000	255.285.000	-
6. BM Pengadaan Meubelair	-	439.065.000	-
7. BM Pengadaan Peralatan Dapur	-	-	-
8. BM Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	38.614.641.652	8.734.525.000	-
9. BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	32.833.517.000	9.302.348.000	-
Jumlah Belanja Modal BLUD	74.876.100.666	19.199.300.013	
BELANJA MODAL BLUD		2014	2013
1. BM Pengadaan Alat-alat Berat	3.155.826.008	5.845.000.000	-
2. BM Pengadaan Alat-alat Bengkel	-	-	-
3. BM Pengadaan Peralatan Kantor	-	501.755.000	-
4. BM Pengadaan Perlengkapan Kantor	178.539.472	554.960.450	-
5. BM Pengadaan Komputer	389.765.000	598.958.750	-
6. BM Pengadaan Meubelair	1.027.500.000	807.814.000	-
7. BM Pengadaan Peralatan Dapur	133.966.800	192.761.000	-
8. BM Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	7.996.568.200	11.454.850.000	-
9. BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.755.746.680	-	-
10. BM Instalasi Listrik	1.200.165.080	-	-
10. BM Bahan Pustaka	-	-	-
Jumlah Belanja Modal BLUD	19.838.077.240	19.956.099.200	

5.3. Penjelasan Pos –Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan Operasional

Laporan Operasional (LO) menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Rincian Pendapatan Operasional selama TA. 2014 adalah sebagai berikut :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Keterangan	2014
1.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	263.275.582.660,07
2.	Pendapatan Hibah	102.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		263.377.582.660,07

5.3.2. Belanja

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Rincian Belanja Operasional selama TA. 2014 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	2014
1	Beban Pegawai	92.132.419.634,00
2	Beban Persediaan	80.069.002.148,62
3	Beban Jasa	92.750.654.679,33
4	Beban Pemeliharaan	11.181.200.552,00
5	Beban Perjalanan Dinas	1.399.580.070,00
6	Beban Penyusutan	34.511.157.708,81
7	Beban Penyisihan Piutang	2.125.721.224,00
8	Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	-
9	Beban Hibah Aset	-
10	Beban Penghapusan Aset	3.647.901.525,46
11	Beban Lain-Lain	1.484.923.539,00
12	Penyetoran Kas Daerah	-
Jumlah		319.302.561.081,22

5.3. Penjelasan Pos –Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Merupakan Komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Laoiran Perubahan Ekuitas TA.2014 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	2014
1	EKUITAS AWAL	523.986.809.636,02
2	SURPLUS/DEFISIT LO	106.701.179.975,80
	SURPLUS/DEFISIT LO	(55.924.978.421,15)
	SURPLUS/DEFISIT LRA	123.966.088.445,00
	KAS BENDAHARA	38.660.069.951,950
	SETOR KE KASDA PROV JAWA TENGAH	-
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(143.889.053.822,00)
	KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG	658.606.590,59
	KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG TIDAK TERTAGIH	1.794.452.008,75

	KOREKSI/PENYESUAIAN PERSEDIAAN	-
	KOREKSI/PENYESUAIAN INVESTASI NON PERMANEN	-
	KOREKSI/PENYESUAIAN ASET TETAP	13.372.442,00
	KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET TETAP	(146.355.484.863,34)
	KOREKSI/PENYESUAIAN ASET LAINNYA	-
4	Ekuitas Akhir	486.798.935.789,82

5.5. Catatan Penting Lainnya

- **Piutang Klaim Jamkesda Provinsi Jawa Tengah**
Berdasarkan laporan evaluasi klaim tahun 2014 terdapat saldo piutang klaim Jamkesda ke Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2014 dengan total piutang klaim sebesar Rp5.799.716.019,- Rinciannya adalah sebagai berikut :

Keterangan	Kasus	Jumlah
Rawat Jalan	9.702	646.391.800
Rawat Inap	4.666	5.153.324.219
Jumlah Piutang	14.368	5.799.716.019

Atas piutang klaim sebesar tersebut diatas, oleh Provinsi Jawa Tengah akan dibayarkan tahun anggaran 2015.

- **Rekening Jamkesmas**
Pada RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo terdapat dana luncturan uang muka jaminan Pemerintah untuk Pasien Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan guna penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat miskin sebesar Rp241.279.881,- yang tersimpan di Bank BRI Cab. Purwokerto dengan nomor rekening : 0077-01-00404-30-6, dari nominal tersebut tidak menambah saldo Bank di neraca dengan asumsi belum dapat di akui sebagai pendapatan. Akan diakui sebagai pendapatan ketika sudah ada verifikasi dan pertanggungjawaban klaim.

	(Dalam Rupiah)	
	2014	2013
Bank BRI No. Rek : 0077-01-00404-30-6	16.203.138.933	241.279.881
Jumlah Belanja Daerah	16.203.138.933	241.279.881

- **Rekening TP APBN**
Pada Tahun Anggaran 2014 RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo mendapatkan Tugas Pembantuan APBN DIPA No. 024.04.4.039649/2014 sebesar Rp20.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp8.295.092.800,- dan masih ada sisa berupa jasa giro di Bank BRI Cab. Purwokerto dengan nomor Rekening No.0077-01-001133-30-2 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp315,-.

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1.1. Gambaran Umum

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo semula merupakan fusi dari RSU Purwokerto yang berlokasi Jl. Dr. Angka No.2 Purwokerto. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto ini menempati satu paket rumah sakit yang terdiri atas dua lantai yang berlokasi di Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto. Fungsionalisasi lokasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto diresmikan secara keseluruhan pada tanggal 12 November 1995. Dilihat dari aspek geografis lokasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sangat menguntungkan, karena terletak di pusat pengembangan wilayah Jawa Tengah bagian selatan - barat, dan terletak di kota yang terus berkembang menjadi kota besar dan kota perdagangan, pendidikan dan pariwisata. Dipihak lain, kota Purwokerto terletak di pertemuan tiga jalur transportasi menuju pusat rujukan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, dengan jarak sekitar 200km. Dari kota semarang, Yogyakarta dan Bandung. Kondisi ini sangat strategis bagi pengembangan dan pemasaran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai RSUD milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berpedoman pada perda No. 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 No. 8 Seri D No. 4, tambahan lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 14) dan peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 94 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 No. 94). Dalam Peraturan Daerah (perda) No. 8 tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dibidang pelayanan Rumah Sakit yang masing-masing dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menunjang pengelola RSUD dapat dibentuk komite-komite, instalasi dan satuan pengawas intern yang pengaturannya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

1.2. Struktur Organisasi

Susunan pengurus Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto, adalah sebagai berikut :

No	Surat Legalitas	Jabatan	Nama
1.	Surat Keputusan Direktur Nomor. 821.2/662/2012 tanggal 26 April 2013	Direktur	dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp. B
2.	Surat Keputusan Direktur	Wadir Pelayanan dan	dr. Liliani, MMR

	No. 445/00001c/I/2012 Tanggal 02 Januari 2012	Kerjasama	
		- Bidang Pelayanan • Seksi Pelayanan Rawat Jalan • Seksi Pelayanan Rawat Inap - Bidang Keperawatan	dr. Untung Gunarto, Sp.S dr. Nanik Harjanti Slamet Riyanto, S.Kep.Ners Supriyatin, S.Kep.Ners
		• Seksi Keperawatan Rawat Jalan • Seksi Pelayanan Rawat Inap - Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama • Seksi Penjaminan Mutu Pelayanan • Seksi Kerjasama	Lilis Ernawati, S.Kep Arikh Ratna P, S.Kep.Ners Edy Purnomo, S.Pd, S.Kep Muniroh, S.Pd, S.Kep Unik Fibriani, DCN
3.	Surat Keputusan Direktur No. 445/00001c/I/2012 Tanggal 02 Januari 2012	Wadir Penunjang dan Pendidikan	dr Moch. Targib, Sp. BS.
		- Bidang Pendidikan dan Penelitian • Seksi Pendidikan dan Penelitian • Seksi Pelatihan - Bidang Penunjang Medis • Seksi Penunjang Diagnosa • Seksi Penunjang Terapi - Bidang Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit • Seksi Penunjang Sarana Prasarana Medis • Seksi Penunjang Sarana Prasarana Non Medis	Nurrekta Yuristrianti, DCN, M.Kes dr. Juanita Indrati dr. Setyo Budiantoro dr. Aditiawarman, Sp.PD Khaerun, SST Kholik Al Amin, S.Si Sri Mulyani, S.Kep.Ners Sugeng Witono, SKM Ira Maduma, S.Sos
4.	Surat Keputusan Direktur No. 445/00001c/I/2012 Tanggal 02 Januari 2012	Wadir Umum dan Keuangan	Drs. Mardiyono Saputro

		- Bagian Perencanaan • Subbagian Program • Subbagian Monitoring dan Evaluasi	Yunita Dyah S, SKM, MSc, MS RR. Oneng Kadarwati, S.Sos Sudar Hesti Karini, SKM
		• Subbagian Rekam Medik	Muji Sri Utami, SKM,
		- Bagian Keuangan • Subbagian Anggaran • Subbagian Akuntansi • Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi - Bagian Umum • Subbagian Tata Usaha Hukum dan Humas • Subbagian Organisasi dan Kepegawaian • Subbagian Rumah Tangga	M.Kes Drs. Bambang Widiyanto P. Mahmud, SE Ida Fitri Astuti, SE - Toto Jatmiko, SH Parsono, SE Suprihanto, SE Siswo, SE

1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Utama

a. Kegiatan Pelayanan Medik, meliputi:

- Pelayanan Rawat Jalan
- Pelayanan Rawat Inap
- Pelayanan Rawat Insentif
- Pelayanan Bedah Sentral
- Pelayanan Gawat Darurat

b. Kegiatan Pelayanan Penunjang Medik, meliputi:

- Pelayanan Rehabilitasi Medik
- Pelayanan Radiologi
- Pelayanan Patologi Klinik
- Pelayanan Patologi Anatomi
- Pelayanan Farmasi
- Pelayanan Haemodialisa
- Pelayanan Transfusi Darah
- Pelayanan PLRS, IPSRS dan ICPH
- Pelayanan Gizi, Forensik dan Ambulance

- Pelayanan Maternal Perinatal
- c. Kegiatan Pelayanan Penunjang Non Medik, meliputi:
 - Pengolahan Limbah
 - Pendidikan dan Latihan
 - Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
 - Pemeliharaan sarana, rumah tangga, dan kamtib
 - Catatan Medik dan Pelaporan
 - Pemasaran dan Asuransi
 - Kebersihan dan Pertamanan

1.4. Moto, Visi dan Misi

Motto

" Kami Melayani dengan Sepenuh Hati "

Visi

" Prima dalam pelayanan spesialistik dan pendidikan profesi "

Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang prima dan mandiri
- b. Menyelenggarakan pendidiakan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas di bidangnya
- c. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan profesionalisme dan kesehatan
- d. Mengembangkan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang tepat untuk mendukung pelayanan prima
- e. Mengembangkan sistem manajemen yang handal, transparan, akuntabel, efektif dan efisien

1.5. Tujuan

Tujuan pendirian rumah sakit adalah :

Khusus :

1. Terwujudnya derajat kesehatan pasien rumah sakit secara optimal, sehingga memuaskan semua pihak.
2. Terwujudnya dokter dan tenaga profesi kesehatan lainnya yang siap pakai dan mampu bersaing di tingkat global.

Umum :

1. Terwujudnya kesehatan paripurna yang lengkap dan terjangkau.
2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan spesialistik yang bermutu internasional.

BAB 7

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk Tahun Anggaran 2014. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Purwokerto, Januari 2015
PENGOLAH ANGGARAN
RSUD Prof. Dr.
MARGONO SOEKARJO
Dr. Haryadi Ibbu Junaedi, Sp. B
NIP. 19620208 198901 1 001

